



Terancam Roboh, Jembatan Pammanu Butuh Perbaikan

Terancam Roboh, Jembatan Pammanu Butuh Perbaikan

BELOPA, FAJAR- Jembatan yang menghubungkan antara lingkungan Pammanu dengan lingkungan Baranapance, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dikeluhkan. Jembatan yang dibangun pemerintah daerah ini hampir roboh.

Warga Pammanu, Thamrin mengatakan, jembatan Baranapance tidak lama lagi rubuh. Olehnya, jika tidak diperhatikan dan diperbaiki lambat laun akan roboh. Menurut dia, oprit jembatan yang menyangga jembatan sudah lama terkikis air.

"Sudah lama kondisinya begini dan belum ada penanganan sampai sekarang," ujarnya.

Padahal, lanjutnya, setiap musrenbang tingkat kelurahan masalah ini telah diusulkan untuk dibawah ke tingkat musrenbang kecamatan hingga ke kabupaten. Akan tetapi, belum pernah terwujud.

Thamrin menyebut, bagian bawah jembatan terkikis karena tidak adanya drainase. Dia meminta anggota DPRD Sulsel, Fadriaty AS untuk memperjuangkan di Pemprov Sulsel agar akses warga setempat tersebut dianggarkan.

Lurah Pammanu, Sri Kartini mengaku kelurahan tidak punya anggaran yang dikelola, apalagi jika itu terkait pembangunan infrastruktur seperti draina-

se. "Kalau ada usulan, kita bisa diperjuangkan untuk direalisasikan di Pemprov Sulsel," paparnya.

Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Fadriaty AS yang didampingi suaminya Ir Rusli Patara alias Eko telah menerima aspirasi tersebut. Ia menjelaskan anggaran di 2024 dan 2025 ini terganggu. Dana APBD Provinsi Sulsel tahun 2024, sebanyak Rp400 miliar digunakan untuk pilkada gubernur Sulsel untuk membiayai KPU, Bawaslu, pihak pengamanan baik Polri maupun TNI.

Kemudian tahun 2025 ini, anggaran DAK dan DAU untuk infrastruktur dipotong dengan dialihkan ke Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, kata dia, kegiatan aspirasi di Pammanu yakni jalan tani mengalami pergeseran, 16 hand traktor yang menjadi pokok pikiran (Pokir) DPRD Sulsel juga hilang.

"Keadaan tidak memungkinkan. Makanya saya tidak bisa banyak berjanji," paparnya.

Meski demikian, ia mengaku aspirasi tersebut tetap akan diteruskan ke provinsi, terutama ke instansi yang punya kewenangan. "Jika ini memang kewenangan provinsi, kita akan perjuangkan. Tetapi, kalau kewenangan ada di kabupaten akan diserahkan ke bupati dan wakil bupati terpilih," tambahnya. **(shd/lin)**